

Hari Ini Presiden Resmikan Tol Sumo

Naik Mobil Listrik Karya ITS

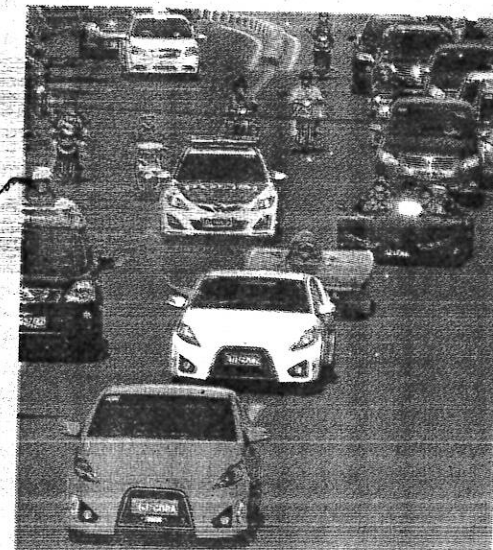
JAKARTA - Penantian panjang itu akan berakhir. Mulai dicangkan 1994, hari ini (19/12), 23 tahun berselang, jalan tol Surabaya-Mojokerto (Sumo) akhirnya menyambung. Naik mobil listrik karya Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan meresmikan ruas tol sepanjang 36,27 km tersebut

▶ *Baca Hari Ini... Hal 11*

SIAP BEROPERASI: Foto ruas tol Surabaya-Mojokerto yang dipotret dari lantai 32 Aryaduta Residences Surabaya kemarin sore.



UMAR WIRAHADI/JAWA POS



FRIZAL/JAWA POS

KINYIS-KINYIS: Gerbang tol Warugunung menjadi salah satu akses jalan tol Surabaya-Mojokerto. Foto kanan, Ezy II saat menjalani tes dari Surabaya menuju Jakarta pada 2014.

Semoga Molina Segera Diproduksi

PRESIDEN Jokowi menggunakan kendaraan spesial dalam peresmian beberapa tol. Ketika menajal tol Becakayu, dia menggunakan Land Rover lawas. Saat meresmikan tol Soroja, mantan wali kota Solo itu naik bus Persib. Hari ini (19/12) kendaraan listrik dipilih RI-1 untuk meresmikan seksi I-B tol Surabaya-Mojokerto (Sumo)

▶ *Baca Semoga... Hal 11*

JALAN PANJANG TOL SUMO

19 AGUSTUS 1994

Perjanjian kuasa penyelenggaraan jalan tol Surabaya-Mojokerto (Sumo) oleh PT Marga Nuyjasumo Agung (MNA)

SEPTEMBER 1997

Proyek jalan tol Sumo dihentikan karena krisis moneter (Keppres 39/1997)

APRIL 2005

PT MNA bisa melanjutkan kembali konstruksi jalan tol Sumo (Keppres 15/2002 tentang Pencabutan Keppres 39/1997)

6 APRIL 2006

Dilakukan penandatanganan

Aspek Politik KLB Difteri

DALAM sebulan terakhir Indonesia dihebohkan berita tingginya angka kejadian difteri, termasuk di Jawa Timur (Jatim). Sedikitnya ada 20 provinsi yang tercatat mempunyai kasus difteri dalam jumlah cukup besar. Pemerintah bertindak cepat dengan menyatakan kesiapsiagaan menghadapi kejadian luar biasa (KLB) tersebut.

Selain aspek medis teknis, KLB difteri memunculkan beberapa aspek politik. *Pertama*, KLB difteri disebabkan angka cakupan imunisasi yang rendah. Hal itu sangat ditopang perubahan kebijakan imunisasi setelah era desentralisasi.

Semula semua kebijakan imunisasi diputuskan di Jakarta dan dijalankan dengan pengendalian kuat dari pusat. Sejak desentralisasi, pola tersebut berubah dramatis.

Masalahnya, tidak semua bupati/wali kota mendukung kegiatan imunisasi melalui perencanaan konkret dengan dukungan dana APBD. Sebagian terkesan enggan dengan memberikan anggaran yang minim sekalipun jenis dan jumlah kegiatan tertulis dalam perencanaannya cukup banyak. Alhasil, di banyak kabupaten/kota cakupan imunisasi merosot secara bertahap dan pasti.

Dalam kongres dunia infeksi anak pada awal Desember 2017, kita bahkan dinilai pengamat internasional sebagai negara dengan cakupan yang tergolong paling rendah di dunia. Dalam pengamatan

penulis, baru kali pertama ini ada pernyataan terbuka yang negatif mengenai imunisasi di negara kita dalam forum internasional.

Kedua, selama ini imunisasi di Indonesia dipandang relatif berhasil. Sebab, selamasetidaknya satu dekade terakhir, angka laporan resmi yang terpampang di situs WHO selalu tinggi. Cakupan DPT3 Indonesia tidak pernah di bawah 90 persen. Sekalipun demikian, banyak orang merasa curiga dan sulit memercayai laporan resmi tersebut. Jika cakupan itu benar, kasus penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi akan menurun tajam. Faktanya, jumlah penyakit tersebut relatif tidak berkurang dan stabil dalam jumlah yang cukup besar.

Di luar difteri, peningkatan kasus campak di seluruh Jatim terjadi pada sepanjang 2016-2017. Tekanan politik penguasa daerah membuat anak buah selalu melaporkan angka yang baik yang tidak sesuai dengan situasi yang sebenarnya. Sudah tentu angka palsu itu merugikan karena membuat perencanaan menjadi keliru.

Ketiga, khusus di Jatim terdapat perbedaan signifikan terhadap angka kejadian difteri beserta cakupan imunisasi antara kawasan "tapal kuda" dan wilayah lainnya. Faktor sosial budaya sangat kental. Pendekatan yang dipakai untuk peningkatan program sangat perlu memperhatikan kekhususan daerah



O l e h
DOMINICUS HUSADA*

ini. Faktor pendidikan, ekonomi, agama, budaya, serta politik kekuasaan di "tapal kuda" berperan besar dalam terpuruknya berbagai program kesehatan, termasuk imunisasi difteri.

Keempat, situasi politik Indonesia yang relatif panas sejak pilpres lalu akan menggoreng semua isu yang muncul untuk kepentingan hingga 2019. KLB difteri tidak lepas dari hal tersebut. Beberapa tuduhan langsung diarahkan kepada pemerintah saat ini. Jika dianalisis lebih dalam, peningkatan kasus difteri, seperti yang dialami Jatim, telah terlihat sejak 2011 ketika gubernur Jatim menyatakan status KLB.

Selama 6-7 tahun terakhir kerja keras berbagai pihak berhasil menurunkan angka kejadian tersebut hingga sekitar sepertiga angka puncak tahun 2012. Namun, angka itu belum sesuai dengan harapan. Dengan demikian, KLB kali ini

bukan kejadian mendadak. Ini adalah akumulasi berbagai hal selama periode yang cukup panjang. Tidak adil menilai persoalan kali ini hanya tanggung jawab pemerintahan Jokowi.

Kelima, Indonesia akan menjadi tuan rumah Asian Games (AG) tahun depan. Sejarah mencatat, berbagai kejadian besar terganggu oleh wabah penyakit. Di masa lalu, penyakit SARS dan flu burung membuat penundaan dan pembatalan banyak kegiatan di berbagai negara. AG kali ini juga tidak luput dari sorotan. Kenyataan bahwa penyakit difteri telah musnah dari beberapa negara maju di Asia akan membuat kontingen olahraga negara tersebut berpikir ulang untuk datang, kecuali jika ada jaminan dari pihak penyelenggara yang notabene adalah pemerintah kita.

Gerak cepat Kemenkes melaksanakan *outbreak response immunization* (ORI) sangat penting karena meredakan KLB tidak dapat dilakukan dengan seketika. Rusia yang tercatat sebagai negara dengan wabah difteri di era modern terbesar di dunia pada 1990-an memerlukan waktu delapan tahun untuk menuntaskan persoalannya. Fokus utama antisipasi tahap awal Kemenkes adalah beberapa provinsi yang akan dipakai sebagai ajang pesta olahraga Asia tersebut. Itu sebabnya, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten didahulukan dalam ORI kali ini. Jatim yang justru

mempunyai kasus terbanyak selama enam tahun terakhir akan mendapat giliran di putaran berikutnya.

Keenam, sebagaimana juga terjadi pada isu besar lain, KLB difteri telah dijadikan panggung oleh segelintir orang untuk tampil sekalipun yang bersangkutan sebelum KLB ini tidak pernah terdengar kiprah dan sepak terjangnya di bidang difteri. Analisis di media massa kemudian bermunculan yang ironisnya justru menenggelamkan para pelaku bidang kesehatan "asli" yang selama ini telah berjuang mengatasi persoalan difteri.

Ketujuh, sekalipun jumlah kasus sudah sangat meningkat, belum terdengar ada kepala daerah yang menyatakan secara resmi KLB di wilayahnya. Pernyataan resmi perlu dibuat secara tertulis dan diumumkan. Konsekuensi membuat pernyataan KLB ialah menanggung semua pembiayaan dan tidak membebani masyarakat.

Bukan hanya itu, pernyataan politik akan membuat kredibilitas kepemimpinan dipertaruhkan. Untuk difteri, hanya gubernur Jatim pada 2011 yang telah menyatakan secara resmi. Status KLB itu telah dicabut secara resmi pula pada medio 2013. (*)

**) Dokter anak, kepala Divisi Penyakit Infeksi dan Tropis Anak FK Unair/RSUD dr Soetomo Surabaya, anggota Komisi Ahli Difteri Nasional*

KEJADIAN LUAR BIASA: Jumlah p

Mewaspada
Bangkitnya Difteri

Hen

Panduan
Vaksin Difteri

Berapa kali dilakukan?

Seseorang harus mendapat imunisasi difteri setidaknya enam kali sebelum usia 14 tahun. Biasanya tergabung dalam pemberian vaksinasi DPT (difteri, pertusis, dan tetanus).

Kapan dilaksanakan?

Imunisasi 1-3
Tiga kali imunisasi dilakukan ketika bayi, setidaknya hingga usia maksimal 18 bulan.

Imunisasi 5
Dilakukan tiga setelah mendapat imunisasi ke-

Imunisasi 6
Dilakukan lima tahun setelah mendapat imunisasi kelima.

Imunisasi 4

Pembaca Menulis

Lagi

Desa Bedali meru-
tu alternatif akses ke
um, kondisinya ber-
jalan desa tetangga



Dua Kali Bayar Iuran BPJS

PADA 13 November 2017 saya mendaftar BPJS Kesehatan. Petugas mengatakan, nanti saya di-SMS mengenai jadwal nemh-
paikan, saya wajib membayar lagi iuran BPJS bulan Desember antara 1-10 Desember. Alasannya, nemhavarana yang saya lakukan

